# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Dalam Negara kita Indonesia begitu banyaknya permasalahan yang ada, permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya ialah masalah mengenai pendidikan masyarakatnya yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, masalah pendidikan belum semua terselesaikan dengan baik dan merata, dari berbagai macam masalah pendidikan yang ada, masalah putus sekolah yang banyak terjadi di Negara kita. Untuk mengatasi permasalahan putus sekolah itu Kemendikbud mengeluarkan Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C.

Sesuai instruksi dari Menteri Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009 “Tentang Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C” dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2009 “Tentang Penyelenggaraan Program Paket C Kejuruan” kebijakan ini dibuat bertujuan untuk mengatasi masalah putus sekolah di Indonesia.

Program Paket C adalah program pendidikan nonformal yang setara dengan pendidikan formal SMA, yang dibuat sejak tahun 2009 sebagai alternatif program untuk mengatasi masalah putus sekolah yang harus diimplementasikan oleh tiap dinas pendidikan diseluruh daerah indonesia. Program Paket C merupakan program penyempurnaan dari program Ujian Persamaan yang sebelumnya diberlakukan. Dalam Program Paket C, siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) diwajibkan untuk terlebih dahulu mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (LPPK) sedangkan Ujian Persamaan sebelumnya tidak ada kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Ijazah dari Paket C ini dihargai sama dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dapat dipergunakan untuk melamar kerja, melanjutkan

kuliah di PTN atau PTS dalam dan luar negeri, penyesuaian golongan jabatan di TNI, POLRI, PNS dan pegawai swasta.

Masalah putus sekolah banyak dihadapi di tingkat daerah seperti halnya di Kabupaten Bekasi yang memiliki cakupan wilayah yang luas, dan jumlah pendudukan yang besar. Kondisi ini merupakan potensi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Bekasi. Namun demikian masih banyak masalah yang berkaitan dengan aspek pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mencoba juga mengatasi masalah-masalah pendidikan yang ada, diantaranya mengenai putus sekolah dan lainnya dengan mengimplementasikan Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di Kabupaten Bekasi sesuai dengan instruksi dari KEMDIKBUD (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 dan 36 Tahun 2009 mengenai Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C.

Sebagaimana dengan Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi adalah mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berakhlaq, sedangkan Misi nya meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan relevansi pendidikan, serta meningkatkan tata kelola dan pencitraan publik.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di Kabupaten Bekasi",** dan melaksanakan KKL di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan tujuan mendapatkan pelajar dan pengalaman secara langsung dilapangan.

### 1.2 Kegunaan KKL

Pelaksanaan KKL ini dilakukan dengan kegunaan, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Menambah pengalaman belajar yang berharga untuk peneliti sebagai mahasiswa dengan keterlibatannya dalam masyarakat dan dunia kerja di instansi tersebut secara langsung.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam laporan KKL ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

3. Secara Praktis

Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat dalam hal peningkatan mutu pendidikan seperti yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

### 1.3 Metode KKL

Sesuai dengan laporan yang ditulis pada laporan KKL ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode.

Peneliti dalam melakukan penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Peneliti melakukan kegiatan observasi secara langsung ke lapangan, melakukan penelitian secara langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, peneliti kemudian menggambarkan kondisi dilapangan yang terjadi mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di Kabupaten Bekasi yang kemudian meringkas dan menarik gambaran tentang kondisi dan situasi dalam laporan ini.

### 1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

Lokasi yang diambil sebagai tempat KKL adalah di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi JL. Deltamas Kecamatan Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351.

**Tabel 1.1**

**Jadwal Penelitian**

Dalam menyusun laporan KKL ini penulis melaksanakan selama 6 bulan, mulai dari observasi lokasi KKL sampai seminar KKL seperti pada tabel berikut :

| **Waktu Kegiatan** | **Tahun 2012** | | | | | | | **Tahun 2013** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Feb |
| Observasi Lokasi KKL | | | | | | | | |
| Pengajuan Judul KKL | | | | | | | | |
| Penyusunan Usulan KKL | | | | | | | | |
| Pengajuan Surat ke Tempat KKL | | | | | | | | |
| Pelaksanaan KKL | | | | | | | | |
| Bimbingan KKL | | | | | | | | |
| Pengumpulan Laporan KKL | | | | | | | | |
| Seminar KKL | | | | | | | | |